

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi K., 2014, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*, Setara Press, Malang.
- Ahmad A.K., 2008, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Indobis Media Centre, Makasar.
- Ali A, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita R., 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2002, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, BKPN. Tim Pengkajian SKPN, Jakarta.
- Chambliss, W.J., 2002, *Corruption, Bureaucracy and Power*, in Chambliss (ed). Sociological Reading in the conflict perspective, dalam Syamsudin M., 2007, *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *UNISIA*, Vol. XXX No. 64 Juni 2007.
- Danil E, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar M., Achmad Y, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Friedmann LM., 2011, *The Legal System: A Social Science Perspective*, [Pent. M. Khozim], Nusamedia, Bandung.
- Gary T.R., 2013, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terjemahan J. Smit DFM, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hamalik O., 2012, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Hamzah A., 2012, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harrison LE., Hutingtong SP., 2000, *Membangun Budaya Bangsa*, Yayasan Obor, Jakarta, dalam Santoso L., Meyriswati D., Alfian I.N., 2014, *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 27, No. 4, tahun 2014.
- Hartanti E., 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryatmoko, 2011, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Kompas, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 2003. *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manulang, M., 2004, *Dasar-dasar Manajemen*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Makawimbang H.F., 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marpaung L., 2001, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.

- Muhammad A.K., 2006, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pangaribuan LM., 2002, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional, Cet. I*, Djambatan, Jakarta.
- Pasamai S, 2010, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT Umitoha, Makasar.
- Putra N.S., Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Rukmini M., 2010, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Siagian S.P., 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sirajun, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang.
- Soekanto S, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH-Undip, Semarang, hlm. 13.
- Sujamto, 2010, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Steven P.Lab, 2013, *Crime Prevention Approaches Practices and Evaluation/Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik dan Evaluasi*, Ptik Press, Jakarta.

Sule, Tisnawati E., Saifullah, Kurniawan, 2006, *Pengantar Manajemen, Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.

Syadam G, 2010, *Manajemen dan Bawahan*, Djambatan, Jakarta.

Syamsuddin A., 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Thontowi J., 2001, *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Wibowo A., 2013, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Nugroho, 2011, Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang

Jurnal Ilmiah

Joel, 2000, Seize the state Seize the Day, state capture, corruption and influence in Transition, *Policy Research Working Paper*.

Lauda A., 2018, Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Legal Spirit*, Vol. 2 No. 1 (2018), Diakses dari <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/jhls/article/view/754/pdf>, ISSN: 1978-2608.

Manialup A.W., Grace B. Nangoi, Morasa J., 2019, Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Diakses dari

<https://media.neliti.com/media/publications/177965-ID-peran-inspektorat-dalam-pelaksanaan-sist.pdf>.

Mustofa, Akhwani, 2019, Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar, *Education and Human Development Journal*, Volume 4. Nomor 2. September 2019.

Neltje, Jeane Saly, 2007, Harmonisasi Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.

Nugroho H., Raharjo A., Pranoto, *Optimasi Pencegahan Korupsi terhadap Bebas Korupsi Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Santoso L., Meyrasyawati D, 2015, Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Universitas Airlangga Surabaya, *Jurnal Review Politik*, Volume 05, Nomor 01, Juni 2015.

Sukron M, Indira S, Satrio A, 2019, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), pp. 45-53. DOI: <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v4.n1.2019.pp>.

Tampubolon SM., 2014, Peran Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014138.

Ubbe, Ahmad, 2007, Implikasi Putusan Bebas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, Maret 2007, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

-----, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara

-----, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Lampiran Peraturan MENPAN Nomor : PER/ is/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Internet

Antara Jateng, 2020, Diakses dari
[https://jateng.antaranews.com/berita/190730/lima-tersangka-tipikor-apbdes-di-banyumas-ditahan tanggal 18 Mei 2020.](https://jateng.antaranews.com/berita/190730/lima-tersangka-tipikor-apbdes-di-banyumas-ditahan tanggal 18 Mei 2020)

